

Urgensi Kebajikan Intelektual di Era Pasca-Kebenaran: Suatu Deskripsi Analitis Melalui Pemikiran Epistemologi Kebajikan
Linda Zagzebski

Herdito Sandi Pratama

ABSTRAK: Epistemologi kebajikan (*virtue epistemology*) adalah suatu gerakan dalam epistemologi yang menggeser fokus epistemologi dari semula menekankan pada keyakinan yang membentuk pengetahuan menuju penekanan pada agen penahu. Strategi analisisnya adalah menggagas karakter kebajikan yang disyaratkan dimiliki oleh agen penahu dalam proses berpengetahuan. Selaras dengan etika kebajikan yang menekankan pada karakter dari agen moral, epistemologi kebajikan mengalihkan fokus dari properti-properti keyakinan kepada karakter intelektual dari agen penahu. Nilai epistemik dipahami sebagai kualitas dari agen penahu yang memampukannya bertindak efektif secara kognitif dan dalam cara-cara terpuji. Artikel ini merupakan deskripsi analitis terhadap epistemologi kebajikan, khususnya dalam pemikiran Linda Zagzebski mengenai kecakapan intelektual dan kebajikan intelektual, serta mendemonstrasikan urgensinya dalam membaca fenomena era dan masyarakat pasca-kebenaran yang ditandai oleh semakin sumirnya batas antara fakta dan fiksi, serta semakin tidak berperannya fakta objektif dalam membentuk opini publik dibandingkan bujukan dan preferensi emosional. Artikel ini berargumen bahwa di tengah keniscayaan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan terciptanya era dan masyarakat pasca-kebenaran, kebajikan intelektual perlu dikembangkan untuk mengaktifkan kembali percakapan publik yang sehat dalam ‘mendekati kebenaran’. Kebajikan intelektual tidak diartikan sebagai dominasi terhadap pluralitas opini, melainkan suatu sikap bertanggung jawab dari agen penahu dalam hidup dan berhadapan dengan era pasca-kebenaran.

KATA KUNCI: epistemologi kebajikan, kecakapan intelektual, kebajikan intelektual, pasca-kebenaran

ABSTRACT: *Virtue epistemology is a movement in epistemology that shifts the focus from its initial emphasis on beliefs that form knowledge towards an emphasis on the knower. The strategy of the analysis is to initiate the character of the virtues needed by the knower in the process of acquiring knowledge. Aligned with the ethics of virtues that emphasizes the character of the moral agent, virtue epistemology shifted focus from the properties of belief to the intellectual character of the knower. Epistemic value is understood as the quality of the knower that enables him to act cognitively in commendable ways. This article is an analytical description of the virtue epistemology, in particular, in Linda Zagzebski's thought about intellectual skills and intellectual virtues. This paper also seeks to demonstrate the urgency in interpreting phenomena and society in the post-truth era which is marked by boundary vagueness between facts and fiction and the diminishing role of objective facts in shaping public opinion when compared to persuasion and emotional preference. This article argues that in the midst of the inevitability of the development of information technology that enables the post-truth era and its society, intellectual virtue needs to be developed to reactivate lively public conversation in 'approaching the truth.' Intellectual virtue is not construed as dominance against the plurality of opinion, but a responsible attitude of the knower in life which deals with the post-truth era.*

KEY WORDS: *virtue epistemology, intellectual skills, intellectual virtues, post-truth*

1. PENDAHULUAN

Gerakan epistemologi kebajikan (*virtue epistemology*) dimulai pada 1980 ketika Ernest Sosa memasukkan ide kebajikan ke dalam diskursus epistemologi dalam makalahnya *The Raft and the Pyramid*. Makalah itu mencoba berdialog dengan isu epistemologi yang berkembang pada masa itu, yakni pertentangan antara fondasionalisme dan koherentisme. Secara umum dapat dikatakan bahwa epistemologi kebajikan ditandai oleh peralihan fokus dari properti-properti keyakinan kepada karakter intelektual dari agen penahu. Nilai epistemik, terutama sekali, adalah kualitas dari agen penahu yang memampukannya bertindak efektif secara kognitif dan dalam cara-cara terpuji. Sebagai suatu gerakan atau sub-bidang baru dalam epistemologi, terdapat dua kecenderungan umum dalam diskursus epistemologi kebajikan. Kelompok pertama mengklaim

URGENSI KEBAJIKAN INTELEKTUAL DI ERA PASCA-KEBENARAN:
SUATU DESKRIPSI ANALITIS MELALUI PEMIKIRAN EPISTEMOLOGI KEBAJIKAN
LINDA ZAGZEBSKI

bahwa sasaran tradisional penyelidikan epistemologi—seperti pengetahuan, rasionalitas, dan justifikasi—dapat didefinisikan dalam pengertian kebajikan intelektual (*intellectual virtue*). Kelompok lainnya berargumen bahwa sasaran tradisional epistemologi itu sendiri harus digantikan oleh sebuah penyelidikan mengenai kebajikan dalam wilayah kognitif (DePaul & Zagzebski, 2007).

Epistemologi kebajikan relatif baru dalam hal kemunculannya sebagai suatu gerakan, di sisi lain etika kebajikan (*virtue ethics*) sudah diupayakan sejak periode awal kemunculan filsafat Barat, terutama sejak Aristoteles. Para epistemolog kebajikan memfokuskan diri pada bagaimana ide kebajikan dapat membantu mengatasi pertanyaan-pertanyaan epistemologis (DePaul & Zagzebski, 2007).

Linda Zagzebski adalah salah satu pemikir epistemologi kebajikan, di samping Ernest Sosa, yang berseberangan dengan proyek naturalisasi epistemologi yang dikerjakan oleh W.V.O. Quine. Dalam pemikiran Quine, epistemologi tidak lagi berkedudukan lebih tinggi dibandingkan ilmu-ilmu deskriptif. Epistemologi didudukan sejajar dengan ilmu empiris, khususnya dianggap sebagai lanjutan dari psikologi (Quine, 2004). Melalui proyek naturalisasi epistemologi, Quine menanggalkan fungsi normatif dari tugas epistemologi. Padahal kebajikan intelektual memungkinkan percakapan rasional yang sehat. Diskusi, dalam sejarahnya, epistemologi—sebagai bidang penyelidikan filsafat yang fokus pada pengetahuan—memiliki sisi normatif sebagai salah satu ciri utamanya. Memang dalam kerjanya, epistemologi tidak lebih fokus pada penjelasan bagaimana ‘sesungguhnya’ agen penahu berpengetahuan, melainkan lebih fokus pada penjelasan bagaimana ‘seharusnya’ pengetahuan itu. Namun meskipun dalam kerjanya seperti itu, epistemologi selalu dikenal menyelidiki pengetahuan dalam sifatnya yang normatif, kritis, dan evaluatif (Sudarminta, 2004). Dengan ditanggalkannya sifat normatif dari epistemologi, bidang ini dalam pandangan Quine menjadi bersifat deskriptif terhadap pengetahuan.

Posisi Quine ini ditolak oleh Zagzebski yang berpandangan bahwa epistemologi bukanlah bidang yang hanya menyajikan deskripsi mengenai pengetahuan, melainkan—sebagaimana fungsi tradisionalnya—mengajukan klaim-klaim normatif mengenai pengetahuan (Turri, Alfano, & Greco, 2017). Dengan mengembalikan fungsi normatif epistemologi, epistemologi kebajikan menyelidiki dan mengajukan klaim untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya agen penahu membentuk keyakinan dan membuat penilaian terhadap bukti-bukti. Menurut Zagzebski, epistemologi pada dasarnya mempromosikan *intellectual well-being* dan secara praktis bermanfaat untuk membantu agen penahu menyadari apakah ia mengetahui atau tidak (Zagzebski, 1996).

Lebih lanjut, bila sebagian besar epistemolog klasik menitikberatkan pada justifikasi, Zagzebski menolaknya. Baginya, justifikasi bukanlah konsep terpenting dalam penilaian epistemik. Sebuah keyakinan terjustifikasi harus dianalisis secara paralel sebagai tindakan benar (*right act*) dalam pengertian murni sebagaimana etika kebajikan. Persoalan mengenai, misalnya, apakah struktur kognitif pengetahuan bersifat fondasionalis (pembenarannya dikembalikan pada suatu fondasi berupa keyakinan dasariah) atau koherentis (pembenarannya dikembalikan pada gagasan bahwa pengetahuan bersifat berjejaring di mana keyakinan-keyakinan saling terhubung sedemikian rupa bagaikan suatu jejaring tanpa ada satupun yang berfungsi sebagai keyakinan dasariah) adalah persoalan turunan yang ditentukan oleh kebajikan intelektual apa yang dilakukan oleh agen penahu (Fairweather & Zagzebski, 2001). Sehingga, komponen evaluatif dari pengetahuan bukanlah justifikasi, melainkan ‘tindak kebajikan intelektual’ (*act of intellectual virtue*). Teori ini bersifat normatif namun dapat ditafsirkan juga sebagai ‘naturalistik’ dalam pengertian tidak mereduksi properti evaluasi epistemik ke dalam properti naturalistik, melainkan pada apa yang dianggap sebagai suatu kebajikan, entah moral atau epistemik, dan secara khusus terhubung kuat dengan bagaimana manusia terkonstruksi oleh alam (Fairweather & Zagzebski, 2001).

URGENSI KEBAJIKAN INTELEKTUAL DI ERA PASCA-KEBENARAN:
SUATU DESKRIPSI ANALITIS MELALUI PEMIKIRAN EPISTEMOLOGI KEBAJIKAN
LINDA ZAGZEBSKI

Singkatnya, epistemologi kebajikan mengadaptasi pekerjaan etika kebajikan yang mula-mula dikembangkan oleh Aristoteles di mana fokus analisisnya bukan pada tindakan bermoral, melainkan pada agen moral. Sama halnya, epistemologi kebajikan fokus pada agen penahu, alih-alih mengenai justifikasi (Zagzebski, 1996).

Pengertian kebajikan di sini tidak dapat dipersempit hanya sebagai kecakapan epistemik, melainkan juga mencakup kapasitas teknis, bakat, dan kualitas. Dalam konteks ini, Zagzebski membuat perbedaan antara 'kecakapan intelektual' (*intellectual skills*) dan 'kebajikan intelektual' (*intellectual virtues*) (Zagzebski, 1996).

Kebajikan intelektual diperlakukan sebagai karakter serupa otonomi dan keberanian intelektual, kehatian-hatian dan keadilan intelektual, serta keterbukaan pikiran. Selain itu, prinsip keterandalan (*reliability*) pun masuk sebagai komponen kebajikan. Kebajikan intelektual punya komponen motivasional dalam mencapai tujuannya. Menurut Zagzebski, apa yang membuat kebajikan intelektual sebagai 'intelektual' adalah motif dan disposisinya dalam memperoleh dan mendekati kebenaran, sementara *reliability* adalah komponen keberhasilan dari kebajikan intelektual. Dengan cara pandang demikian, Zagzebski memadukan antara fitur internalis berupa tanggung jawab dan fitur eksternalis mengenai keberhasilan epistemik (Fairweather & Zagzebski, 2001).

Kecakapan intelektual mencakup di antaranya 1) keterampilan verbal berupa kecakapan berbicara dan menulis; 2) keterampilan perseptual seperti kecakapan menemukan fakta, seperti halnya jurnalis dan detektif; 3) keterampilan logis yakni keterampilan membentuk penalaran induktif dan deduktif serta kemampuan memikirkan contoh berlawanan (*counter-examples*); 4) keterampilan eksplanatoris seperti kemampuan membuat analogi berwawasan; 5) keterampilan matematis dan penalaran kuantitatif; 6) keterampilan penalaran spasial seperti misalnya kecakapan dalam merangkai *puzzle*; dan 7) keterampilan mekanikal seperti mengetahui bagaimana menjalankan dan memanipulasi mesin dan objek fisik

lainnya (Zagzebski, 1996).

Sementara itu, kebajikan intelektual mencakup di antaranya 1) kemampuan mengenali fakta yang menonjol dan peka terhadap rincian; 2) keterbukaan pikiran dalam mengumpulkan dan menaksir bukti; 3) adil dalam menilai argumentasi pihak lain; 4) memiliki kerendah-hatian intelektual; 5) ketekunan intelektual, ulet, peduli, dan menyeluruh dalam membuat pandangan; 6) memiliki kemampuan adaptasi intelektual; 7) mampu berpikir mengenai eksplanasi koheren mengenai fakta-fakta; 8) mampu mengenali otoritas yang andal; 9) mampu memberi wawasan pada orang, masalah, dan teori; dan 10) mengajarkan kebajikan, bersikap komunikatif, mencakup pengenalan terhadap pendengar dan bagaimana mereka meresponnya (Zagzebski, 1996).

Tabel 1. Kecakapan dan Kebajikan Intelektual menurut Zagzebski
(Zagzebski, 1996)

Intellectual skills	Verbal skills
	Perceptual acuity skills
	Logical skills
	Explanatory skills
	Mathematical skills and skills of quantitative reasoning
	Mechanical skills
Intellectual virtues	The ability to recognize salient facts; sensitivity to detail
	Open-mindedness in collecting and appraising evidence
	Fairness in evaluating the arguments of others
	Intellectual humility
	Intellectual perseverance, diligence, care, and thoroughness
	Adaptability of intellect
	The detective's virtues
	Being able to recognize reliable authority
	Insight into persons, problems, theories
	The teaching virtues

Dalam merumuskan kebajikan intelektual tersebut, Zagzebski memperoleh sumbangan dari metode berpikir reflektif John Dewey. Metode berpikir reflektif itu mencakup 1) keterbukaan pikiran; 2) kesungguhan hati (*wholeheartedness*); dan 3) tanggung jawab. Keterbukaan pikiran dapat dipahami sebagai bebas dari prasangka, keberpihakan pada kelompok tertentu, atau hal lain yang dapat menutup kerja pikiran yang membuatnya tidak lagi mampu mempertimbangkan masalah baru, apalagi menggeluti ide baru. Kesungguhan hati (*wholeheartedness*) dapat diartikan sebagai sikap ingin tahu dan atas dasar keingintahuannya itu, subjek mendayagunakan kerja akal pikirannya demi memenuhi rasa ingin tahu tersebut. Sementara tanggung jawab memang sering dianggap sebagai sikap moral dibandingkan intelektual. Namun, tanggung jawab justru adalah sikap intelektual yang menopang keterbukaan pikiran dalam melihat ide baru dan rasa ingin tahu. Dengan tanggung jawab, seseorang akan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin muncul dari tindakan yang diambilnya berdasarkan keyakinan dan pengetahuannya (Zagzebski, 1996). Metode berpikir reflektif memungkinkan percakapan rasional terjadi dan pengetahuan bertumbuh, serta pada akhirnya mencirikan masyarakat yang terbuka terhadap gagasan dan argumentasi.

2. MASYARAKAT DAN ERA PASCA-KEBENARAN

Pada konteks pluralitas, potensi terjadinya polarisasi dan konflik terbuka lebar, khususnya ketika dikaitkan dengan situasi mutakhir yang melibatkan entitas politik, kepentingan, komunitas, ideologi, ekonomi, primordialisme, dan konteks sosiologis lainnya. Apakah pluralitas dapat diatasi dengan satu opini tunggal yang menjadi denominator kebenaran? Ataukah memang kebenaran tidak lagi relevan dan kita sudah masuk dalam suatu era dan masyarakat pasca-kebenaran (*post-truth*)?

Kamus *Oxford* menjadikan istilah '*post-truth*' sebagai *word of the year* pada 2016. *Oxford* mendefinisikan pasca-kebenaran sebagai hal yang terkait dengan keadaan di mana kebenaran objektif kurang berpengaruh dalam

membentuk opini publik dibanding bujukan emosi dan keyakinan pribadi (Wang, 2016). Prefiks ‘pasca-’ (*post-*) tidak dimaknai sebagai ‘setelah’, melainkan menyatakan bahwa kata yang mengikutinya (kebenaran; *truth*) dikesankan menjadi tidak relevan lagi. Kata ini dipilih oleh editor *Oxford* lantaran penggunaannya meningkat 2000 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya (Wang, 2016).

Kendati meluas dalam konteks konstestasi politik dan opini publik yang banyak berkembang dan dimediasi oleh teknologi informasi, istilah pasca-kebenaran sebenarnya sudah lama dikenal sejauh dimengerti sebagai kondisi di mana ‘fakta alternatif’ menggantikan ‘fakta aktual’. Menurut Lee MacIntyre, pasca-kebenaran dipraktikkan sebagai supremasi ideologis untuk membujuk seseorang (atau sekelompok orang) untuk mempercayai sesuatu dengan mengabaikan bukti-bukti aktual. Dengan pengertian demikian, menurut MacIntyre, pasca-kebenaran tidaklah dimulai sejak 2016, melainkan sudah menjadi fenomena yang jauh lebih lama dan mengalami perkembangan dan perluasan hingga saat ini. Pasca-kebenaran pun termasuk di dalamnya adalah bias kognitif yang membuat subjek merasa bahwa kesimpulan yang diyakininya sudah berbasis pada penalaran yang memadai kendati pada kenyataannya tidak.

Pasca-kebenaran sudah terjadi pada sebagian masyarakat yang menolak vaksin atas dasar alasan yang sumir atau penafsiran agama, mereka yang menyangkal teori evolusi, mereka yang membantah bahaya rokok, mereka yang menyangsikan pemanasan global, mereka yang membantah klaim bumi bulat (*spherical*), dan kini mereka yang pro-Jokowi atau pro-Prabowo dalam konteks politik mutakhir Indonesia. Dengan demikian, pasca-kebenaran adalah fenomena global (juga terartikulasi secara lokal) yang sudah lama menyebar dan berkembang di wilayah ilmiah, agama, politik, dan sosial. Kondisi yang mendorong menguatnya fenomena pasca-kebenaran ini adalah kemunduran media tradisional dan sekaligus kebangkitan media sosial, yang diikuti oleh penggunaan berita palsu (*fake news*) sebagai alat politik untuk kepentingan kelompok (MacIntyre, 2018).

URGENSI KEBAJIKAN INTELEKTUAL DI ERA PASCA-KEBENARAN:
SUATU DESKRIPSI ANALITIS MELALUI PEMIKIRAN EPISTEMOLOGI KEBAJIKAN
LINDA ZAGZEBSKI

Dengan mediasi dan kekuatan teknologi informasi, khususnya media sosial, pasca-kebenaran teraksentuasi lebih nyata dan keras. Jika seseorang tidak suka atau tidak menyetujui suatu posisi dalam isu tertentu, maka dengan lari ke internet dan media sosial ia akan menemukan melimpahnya opini yang sesuai dengan preferensi yang dimilikinya. Dengan berkali-kali meng-klik, membaca, dan bahkan membagikannya pada pihak lain, maka akan tercipta suatu gelembung (*bubble*) yang dapat terus membesar, yang selalu sesuai dan kongruen dengan preferensi pengguna. Akibatnya, orang tidak perlu membuka pikirannya untuk memberi peluang mengoreksi keyakinannya semula. Berbekal preferensi/keyakinan, media sosial memberikan ruang demikian besar untuk melayaninya. Dengan cara demikian, posisi orang akan mengental dan menjadi suatu skemata kognitif yang sukar lagi diubah. Polarisasi mudah terjadi dan berkombinasi dengan pandangan eksklusif lantaran tidak berbasis pada bukti aktual, melainkan pada bukti yang tersedia di media sosial. Dampaknya, konflik sosial mungkin saja mudah terjadi dan dapat menciptakan situasi-situasi jebakan sosial (*social trap*) yang menggerus kepercayaan (*trust*) di tengah masyarakat (Rothstein, 2005). Di sisi lain, hal ini menguntungkan bagi elit politik dalam membentuk opini publik. Bahkan, elit yang pada dasarnya minoritas ini mengatur publik mayoritas dalam suatu logika yang tersembunyi (Taleb, *Skin in The Game: Hidden Asymmetries in Daily Life*, 2018).

Fenomena itu dimungkinkan akibat algoritma yang berlaku sendiri di balik media sosial. Suatu logika yang awalnya memungkinkan pengembang mengetahui dengan pasti apa preferensi pengguna sehingga distribusi iklan dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Perkembangannya kemudian adalah dihasilkannya 'ruang gema' (*eco-chamber*). Dengan membuka media sosial dan internet, seakan-akan kita meneriakkan sendiri preferensi dan keyakinan kita, lalu media sosial itu akan berbalik menggemakan suara kita. Kita tidak akan mendengar opini berbeda, pendapat berseberangan, kontra-argumen, dan bukti yang meyakinkan

untuk membantah atau memberi kita peluang mengoreksi keyakinan awal kita.

Isolasi intelektual dalam media sosial terjadi dan disebut sebagai ‘gelembung penapis’ (*filter bubble*). Isolasi ini merupakan hasil dari riwayat pencarian pribadi pengguna dalam dunia maya. Algoritma yang bekerja dalam suatu situs *web* akan menebak dan mendistribusikan informasi apa yang diinginkan oleh sang pengguna berdasarkan riwayat pencarian, lokasi pengguna, interaksi di media sosial, maupun kebiasaan klik di masa lalu. Dengan algoritma ini, akibatnya, pengguna akan terisolasi dan terpisah dari informasi-informasi yang berseberangan atau berbeda dari sudut pandang sang pengguna sendiri. Ini menciptakan situasi terisolasi dalam gelembung (*bubbles*) ideologis, politis, dan kultural tertentu (Pariser & Kemerling, 2011).

Skandal Cambridge Analytica adalah contoh yang nyata bagaimana skandal kekuatan algoritma media sosial membuat polarisasi dan pengging-ringan opini terjadi dengan mudah (Osborne & Parkinson, 2018). Kriti-sisme publik berhadap-hadapan dengan algoritma yang membuat disku-si publik tidak mudah terjadi meski tampaknya demokratisasi teknologi telah terjadi. Setiap orang dapat memiliki gawai dan terhubung dengan jaringan luas, namun pada saat bersamaan ruang gema (*eco-chamber*) bekerja.

Budaya yang berkembang di era pasca-kebenaran ini didorong oleh media sosial. Menurut A.C. Grayling, opini yang kuat dapat memadamkan bukti. Di era ini, apa yang diyakini dipandang lebih berharga daripada fakta. Selain itu, budaya pasca-kebenaran bersifar narsistik. Berkat internet, kita dapat mempublikasikan opini kita secara luas dan membuat kita menjadi serupa selebriti (Coughlan, 2017).

Posisi diametral dalam opini yang berkembang di internet mudah menjelma menjadi perseteruan antar-pribadi, pada gilirannya antar-ke-lompok. Berita palsu pun telah menjadi perdebatan pasca-kemenangan Donald Trump. Dalam konteks ini, menurut Grayling, budaya *online* tidak

dapat membedakan antara fakta dan fiksi. Proses yang terjadi di dalam dunia maya justru berpotensi merusak percakapan publik dan demokrasi (Coughlan, 2017).

Pada era pasca-kebenaran, segala jenis pernyataan yang benar dan bohong pun seakan sayang untuk diabaikan dan dibuang. Bila sebelumnya kita relatif mudah melawankan kebenaran dengan kebohongan, pada era pasca-kebenaran hal ini tidak lagi mudah dilakukan. Simona Modreanu menunjukkan bagaimana sekarang kita banyak menggunakan eufemisme seperti misalnya suatu kebohongan dinyatakan sebagai “tertantang secara etis”, “kebenaran sementara tidak tersedia”, sehingga terjadi pengaburan antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan ketidakjujuran, fiksi dan nonfiksi (Modreanu, 2017), juga kenyataan dan hoaks (*hoax*). Begitu juga dengan istilah ‘fakta alternatif’ yang mengemuka setelah inaugurasi Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (*‘Alternative facts’ – the greatest, strongest facts that ever existed*, 2017).

Modreanu mensinyalir bahwa motif dari fenomena pasca-kebenaran dapat ditarik jauh ke dalam tren pasca-modern yang menolak narasi kebenaran tunggal hingga fenomena hari ini yang ditandai oleh pengaruh figur publik, relativisme, kemunduran komunitas, dan narsisme. Lebih jauh, sifat era pasca-kebenaran yang berpadu dengan ketidakpedulian kultural menghasilkan masyarakat rapuh yang penuh kecurigaan sekaligus mengikis fondasi kepercayaan yang mendasari peradaban sehat. Individu saat ini berjuang untuk memahami pengetahuan dari bertumpuknya informasi yang tumbuh secara eksponensial dan seringkali tidak berfaedah. Akibatnya, masa depan semakin sulit diramalkan. Kondisi demikian menghasilkan disonansi kognitif dan untuk mengatasinya, sayangnya, masyarakat kembali pada keyakinan dan intuisi (Modreanu, 2017). Keyakinan dan intuisi menjadi basis preferensial dari masyarakat dalam berhadapan dengan situasi dunia yang seakan tidak dapat lagi dikendalikan karena sifat ketidakpastiannya. Persis pada soal keyakinan dan intuisi inilah problem epistemik dan sosial, mengemuka dan teraksentuasi.

3. KEBIJAKAN INTELEKTUAL DI ERA PASCA-KEBENARAN

Pada dimensi yang lebih teknis, fenomena pasca-kebenaran dengan definisi yang diberikan Oxford, tampak tumpang-tindih dengan bias kognitif yang bersifat intuitif. Bias kognitif adalah kesalahan berpikir yang sistematis (*systematic error*), kadangkala disebut juga sebagai bias sistematis karena sifatnya yang berpola dan berulang. Dan Ariely menyimpulkan sifat sistematis ini dalam judul bukunya *Predictably Irrational*, manusia dapat diprediksi bersifat irasional dalam banyak kasus. Ia dapat diprediksi irasional karena dalam berbagai eksperimen didapati bahwa manusia seringkali mengambil keputusan yang irasional, tidak melakukan kalkulasi dan pertimbangan yang rasional (Ariely, 2010).

Dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Daniel Kahneman, disimpulkan bahwa manusia memiliki dua sistem berpikir. Sistem 1 adalah sistem berpikir cepat, yang bersifat intuitif dan memiliki fungsi survivalitas. Sistem 2 adalah sistem berpikir lambat yang mengandalkan kalkulasi rasional dan juga aritmatika. Sistem 1 yang mengandalkan kecepatan, seringkali membawa manusia ke dalam situasi bias kognitif. Intuisi membantu bertahan hidup, namun seringkali tidak logis dan rasional, bahkan keliru (Kahneman, 2011).

Salah satu bias kognitif yang sering dilakukan manusia adalah bias konfirmasi. Bias ini terjadi ketika kita berangkat dari suatu keyakinan, sementara pengalaman yang dialami akan diseleksi sedemikian rupa oleh suatu mekanisme internal dalam diri kita sehingga hanya akan membenarkan keyakinan kita semula (Dobelli, 2011). Pada bias ini, bukti-bukti yang tidak mendukung keyakinan akan terseleksi dan lenyap dari pelupuk mata. Akibatnya, pengalaman hanya akan berpihak pada keyakinan semula kita. Sejumlah konflik dan perseteruan seringkali terjadi karena secara intuitif mudah sekali kita melakukan bias konfirmasi. Terlebih di era pasca-kebenaran, sifat dan algoritma media sosial semakin memfasilitasi praktik bias konfirmasi. Bias konfirmasi yang semula bersifat intuitif, kini

bersifat teknologis. Subjek tidak lagi mampu dengan mudah mengenali bukti dan melakukan penilaian yang adil terhadapnya (Taleb, *The Black Swan: The Impact of The Highly Improbable*, 2007).

Dengan demikian, kita tidak hanya memerlukan kerja kognitif berupa kecakapan intelektual, melainkan juga kebajikan intelektual. Berdasarkan perspektif etika kebajikan Zagzebski, penulis berpendapat bahwa masyarakat perlu menumbuhkan dan mengembangkan kebajikan intelektual, khususnya dalam konteks dan situasi era pasca-kebenaran.

Demokratisasi media sosial merupakan suatu terobosan yang mampu mengatasi keterbatasan media konvensional seperti media massa dan kerja jurnalistik (Ekman & Widholm, 2015). Otoritas informasional tidak lagi terpusat pada pers, melainkan terdifusi dan meretas ke dalam setiap lapisan masyarakat, setiap individu yang terkoneksi dengan jejaring dunia maya. Perkembangan niscaya dari teknologi informasi menghasilkan bentuk masyarakat berjejaring yang menggunakan logika inklusi-eksklusi. Artikulasi hanya dimungkinkan bagi seseorang atau masyarakat seandainya mereka terhubung dalam jejaring. Mereka yang tidak terhubung, akan tereksklusi dengan sendirinya (Castells, 2000).

Kecepatan dan sifat *real-time* dari jejaring dunia maya memungkinkan informasi tumbuh secara cepat. Informasi tumbuh secara eksponensial, sementara pengetahuan tumbuh secara linier. Artinya, cepatnya informasi bertumbuh tidak dengan sendirinya diikuti pertumbuhan pengetahuan dalam kecepatan yang sama. Kini kita dibanjiri informasi, namun tidak berupa pengetahuan berwawasan (Taleb, *The Black Swan: The Impact of The Highly Improbable*, 2007). Sementara itu, dalam konteks epistemologi, Nicholas Rescher berpandangan bahwa pengetahuan berkembang mengikuti hukum *diminishing marginal returns*, akibatnya setiap penambahan pengetahuan senantiasa menghasilkan suatu pertanyaan reflektif terbuka (*open question*) yang bisa menjadi wilayah diskursus filosofis (Rescher, *Philosophical Reasoning: A Study in the Methodology of Philosophizing*, 2001). Bahkan pertumbuhan pengetahuan sekalipun, bila disikapi secara

bijak, selalu membuka ruang diskusi filosofis.

Kemampuan untuk membuka diri pada percakapan rasional, yang dicirikan dengan keterbukaan pikiran untuk memeriksa keyakinan dan menimbang secara cermat bukti-bukti pembentuk pengetahuan, menjadi tumpul ketika berhadapan dengan keberlimpahan informasi, yang ironisnya sering berupa ruang gema akibat proses isolasi melalui gelembung penapis.

Dalam konteks keniscayaan perkembangan teknologi yang begitu signifikan mengubah cara hidup masyarakat mutakhir, kita tidak dapat memungkiri transformasi masyarakat yang demikian cepat. Namun, di sisi lain, tidak dapat begitu saja bersikap pasrah dan larut dalam perkembangan yang ada. Jalan yang masuk akal, kendati ini bersifat normatif, adalah bersikap moderat terhadap perkembangan teknologi dan masyarakat, sekaligus mengembangkan kecakapan dan kebajikan intelektual. Dengan demikian, terdapat optimisme dan peluang bagi masyarakat untuk bersikap rasional, kritis, dan sekaligus terpuji secara intelektual.

Polarisasi dan penggiringan opini publik—akibat kecepatan, algoritma media sosial, dan kepentingan politik—dimungkinkan karena secara intuitif publik tidak lagi mampu memeriksa fakta dan informasi yang tersaji. Kita tidak sensitif terhadap sifat dari fakta itu, bagaimana ia diperoleh, dan otoritas apa yang bekerja di baliknya. Berpadu dengan pikiran yang tertutup, yang tidak lagi berkenan memeriksa keyakinan sendiri dan premis-premis pendukungnya, akan menghasilkan polarisasi tajam di masyarakat. Dalam situasi ini, argumentasi sendiri apalagi argumentasi lawan tidak akan mudah dinilai secara adil, tidak ada wawasan yang dihasilkan, dan tidak ada kerendah-hatian intelektual dalam menyikapinya. Semua ini mematikan diskursus rasional dan terbuka pada masyarakat pengguna, kendati dunia maya sendiri menjanjikan potensi keterbukaan dan demokratisasi.

Dengan demikian, beberapa kebajikan intelektual urgen untuk dikembangkan dalam konteks era pasca-kebenaran di antaranya adalah kemampuan mengenali fakta dan sensitivitas terhadap rincian, keterbukaan

URGENSI KEBAJIKAN INTELEKTUAL DI ERA PASCA-KEBENARAN:
SUATU DESKRIPSI ANALITIS MELALUI PEMIKIRAN EPISTEMOLOGI KEBAJIKAN
LINDA ZAGZEBSKI

pikiran, adil dalam menilai argumentasi, rendah hati intelektual, mampu mengenali otoritas yang andal, mampu memberi wawasan, dan pada akhirnya mampu mengajarkan kebajikan pada sesama. Melalui kebajikan intelektual, agen penahu akan secara arif mampu 'mendekati kebenaran', terlepas dari apapun definisi mengenainya, dalam era pasca-kebenaran.

Kebajikan intelektual dan kecakapan intelektual memiliki hubungan yang erat, meskipun kebajikan lebih utama dibandingkan kecakapan intelektual. Dalam pandangan Zagzebski, komponen motivasional dalam kebajikan intelektual membuat definisi dari kebajikan intelektual tidak terbatas hanya dalam pengertian efektivitas eksternalnya, sebagaimana dalam kecakapan intelektual. Dalam pengertiannya, kebajikan intelektual memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan kecakapan intelektual karena kecakapan intelektual hanya lebih menyangkut subjek khas, konteks tertentu, dan peran yang tertentu pula (Zagzebski, 1996).

Dengan kuatnya karakter intelektual dari partisipannya, kebajikan intelektual memungkinkan percakapan rasional yang sehat. Diskusi, kritisisme, dan penyelidikan rasional sebagai instrumen dalam mencapai kebenaran yang dilakukan secara bertanggung jawab dan menghargai pendapat berbeda. Dampaknya, kekerasan fisik, verbal, maupun performatif, kecil berpeluang terjadi. Pluralitas opini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan disikapi dengan pikiran terbuka dan watak yang terpuji.

Dengan mengembangkan kebajikan intelektual, tentu saja dunia tetap bersifat plural dalam pengertian tidak ada kebenaran tunggal yang mampu mengatasi seluruh opini. Kebajikan intelektual tidak dimaksudkan sebagai proyek yang menghasilkan dominasi untuk mengatasi pluralitas opini. Melainkan, suatu sikap terpuji untuk menginsyafi keterbatasan pengetahuan manusia. Modreanu menyarankan ditumbuhkannya suatu humanisme baru dalam menghadapi era pasca-kebenaran (Modreanu, 2017). Namun, setidaknya, jawaban terhadap persoalan besar dalam era pasca-kebenaran terletak dalam diri setiap individu, dengan mengajarkan dan menumbuhkan kebajikan intelektual. Meski sulit, kebajikan intelektual

pun dapat diajarkan sebagaimana kecakapan intelektual (Zagzebski, 1996). Tentu, ketika diajarkan dan ditumbuhkan, kebajikan intelektual mensyaratkan juga kecakapan intelektual. Dengan demikian, untuk hidup di era pasca-kebenaran, tidak hanya berpikir kritis (*critical thinking*) yang dikembangkan, tetapi juga moralitas intelektual.

Menumbuhkan dan mengembangkan kebajikan intelektual, sebagaimana kebajikan dalam pengertian umumnya, memerlukan waktu yang sangat lama, melalui proses pembiasaan (habitulasi) yang intensif dan repetitif. Begitu suatu kebajikan berkembang dalam diri seseorang, maka kebajikan itu akan tertanam dalam karakter orang tersebut dan menjadi sejenis watak (*second nature*) (Zagzebski, 1996) yang permanen sebagai kualitas diri. Secara akumulatif, sebagai keseluruhan, masyarakat akan mampu bertanggung jawab secara intelektual dalam kehidupan di era pasca-kebenaran dan menghidupkan kembali peradaban yang sehat.

4. PENUTUP

Epistemologi kebajikan memberi penekanan pada karakter intelektual agen penahu (subjek) dibandingkan keyakinan yang membentuk pengetahuan. Berdasarkan pemikiran epistemologi kebajikan Linda Zagzebski, dibedakan antara kecakapan intelektual dan kebajikan intelektual. Keduanya terkait, di mana kecakapan intelektual merupakan keterampilan untuk menyelesaikan persoalan eksternal dan kontekstual, sementara kebajikan intelektual lebih bersifat internalis dan bercakupan lebih luas yang mengartikulasikan karakter dan watak intelektual dari agen penahu. Di era pasca-kebenaran, yang dimungkinkan berkat perkembangan mutakhir teknologi informasi, fakta tidak lebih berperan dibandingkan bujukan emosional dan preferensial dalam membentuk opini publik. Batas antara kebenaran dan kebohongan menjadi sumir, pada gilirannya berdampak sosial berupa polarisasi, konflik, jebakan sosial, dan mundurnya masyarakat sehat yang rasional. Dengan keniscayaan perkembangan teknologi dan kenyataan era pasca-kebenaran, kebajikan intelektual menjadi

URGENSI KEBAJIKAN INTELEKTUAL DI ERA PASCA-KEBENARAN:
SUATU DESKRIPSI ANALITIS MELALUI PEMIKIRAN EPISTEMOLOGI KEBAJIKAN
LINDA ZAGZEBSKI

urgen untuk ditumbuhkembangkan pada setiap individu dan masyarakat, demi menghasilkan tidak hanya kritisisme rasional tetapi juga sikap bertanggung jawab dalam hidup dan menghadapi era pasca-kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alternative facts' – the greatest, strongest facts that ever existed*. (2017, January 23). Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/us-news/shortcuts/2017/jan/23/alternative-facts-the-greatest-strongest-facts-that-ever-existed>
- Ariely, D. (2010). *Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions*. Harper Perennial.
- Castells, M. (2000). *The Rise of The Network Society*. New York: John Wiley & Sons.
- Coughlan, S. (2017, January 12). *What does post-truth mean for a philosopher?* Retrieved from www.bbc.com: <https://www.bbc.com/news/education-38557838>
- DePaul, M., & Zagzebski, L. (2007). *Intellectual Virtue: Perspectives from Ethics and Epistemology*. New York: Oxford University Press.
- Dobelli, R. (2011). *The Art of Thinking Clearly*. New York: Harper .
- Ekman, M., & Widholm, A. (2015). Politicians as Media Producers: Current Trajectories in the Relation Between Journalists and Politicians in the Age of Social Media. *Journalism Practice*, 9(1), 78-91.
- Fairweather, A., & Zagzebski, L. (2001). *Virtue Epistemology: Essays on Epistemic Virtue*. New York: Oxford University Press.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- MacIntyre, L. (2018). *Post-Truth*. MIT Press.
- Modreanu, S. (2017). The Post-Truth Era ? *HSS, vol. VI, no. 3*, 7-9.
- Osborne, H., & Parkinson, H. J. (2018, March 22). *Cambridge Analytica scandal: the biggest revelations so far*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/22/cambridge-analytica-scandal-the-biggest-revelations-so-far>
- Pariser, E., & Kemerling, J. (2011). *The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You*. Retrieved from www.lse.ac.uk/assets/richmedia/channels/

publicLecturesAndEvents/slides/20110620_1830_theFilterBubble_sl.pdf

- Quine, W. (2004). Epistemology Naturalized. In E. Sosa, & K. Jaegwon, *Epistemology: An Anthology* (pp. 292-300). Malden: Blackwell Publishing.
- Rescher, N. (1995). *Pluralism against The Demand for Consensus* . New York: Oxford University Press.
- Rescher, N. (2001). *Philosophical Reasoning: A Study in the Methodology of Philosophizing*. New York: Wiley-Blackwell.
- Rothstein, B. (2005). *Social Traps and the Problem of Trust*. New York: Cambridge University Press.
- Sosa, E. (2001). *A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective*. Oxford: Clarendon Press.
- Sudarminta, J. (2004). *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan: The Impact of The Highly Improbable*. New York: Random House.
- Taleb, N. N. (2018). *Skin in The Game: Hidden Asymmetries in Daily Life*. New York: Random House.
- Turri, J., Alfano, M., & Greco, J. (2017). *Virtue Epistemology*. The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
- Wang, A. B. (2016, November 16). Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/16/post-truth-named-2016-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries/?noredirect=on&utm_term=.a6b57231c70d
- Zagzebski, L. T. (1996). *Virtues of The Mind: An Inquiry into The Nature of Virtue*. Cambridge: Cambridge University Press.